

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP)

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jln. Muhammad Malikul Zhahir No. 145 Telp. (0645) 46997 Fax. (0645) 41991
KOTA LHOKSEUMAWE



**PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Penyusunan LKj-IP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2019 telah selesai dilaksanakan. LKj-IP ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj-IP Tahun 2019 ini sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kewenangan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengembangkan visi, misi dan tujuan organisasi.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LKj-IP ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan LKj-IP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dimasa yang akan datang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan LKj-IP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2019 dan kepada Allah SWT kita memohon petunjuk dan bimbingan, sehingga Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe mampu melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya serta dapat meningkatkan prestasi kerja.

Lhokseumawe, Januari 2020

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE,**



AZWAR, SH, MAP

NIP. 19630925 200212 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik. Seperti diketahui, RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 menjabarkan visi dan misi Pemerintah Kota Lhokseumawe yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran BPKD Kota Lhokseumawe kedalam bentuk agenda dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan pembangunan. Berbagai agenda dan prioritas pembangunan tersebut sampai dengan tahun 2019. Karenanya, seberapa jauh keberhasilan yang telah dicapai tentunya perlu dilihat evaluasi 1 (satu) tahun atau pada tahun 2019 perlu dilakukan untuk mengetahui dan menilai capaian yang telah dihasilkan. Evaluasi berguna untuk menyusun perencanaan tahun-tahun berikutnya sebagai bahan pertimbangan dan bahan masukan.

Visi dan Misi

Perumusan visi dan misi jangka menengah Kota Lhokseumawe merupakan salah satu tahapan penting dalam penyusunan RPJMD. Selain itu, visi juga menjelaskan cara pandang jauh kedepan yang didalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan bagaimana Kota Lhokseumawe harus dibawa dan diarahkan agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif pada masa yang akan datang untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe. Jadi visi Pemerintah Kota Lhokseumawe adalah cita-cita yang menggambarkan akan dibawa kemana Kota Lhokseumawe dimasa mendatang, dan visi selalu berpijak dari kondisi,

potensi, masalah, tantangan, hambatan dan tuntutan masyarakat. Adapun visi Kota Lhokseumawe adalah :

**“Mewujudkan Kota Lhokseumawe Bersyariat, Sehat, Cerdas
Dan Sejahtera Berdasarkan UU-PA Dan MoU Helsinki”**

Misi merupakan rumusan umum yang memuat tentang suatu tindakan atau upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi. Jadi misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Dalam suatu dokumen perencanaan rumusan misi mempunyai peran yang sangat penting yang diharapkan dapat memberikan kerangka tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dan untuk menentukan arah yang akan ditempuh dalam mencapai visi Kota Lhokseumawe. Untuk mendukung terwujudnya visi tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKD Kota Lhokseumawe serta untuk mensinergikan arah, kebijakan, visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD misi keempat : “Mewujudkan Kota Lhokseumawe dengan tata kelola Pemerintahan yang bersih dan baik (Clean and Good Governance), demokrasi yang berlandaskan hukum, yaitu pemantapan Kinerja Pemerintah Daerah yakni upaya-upaya peningkatan sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang meliputi penetapan kebijakan dan regulasi, pembinaan aparatur Pemerintahan Daerah, pengembangan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan sebagai upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Demikian pula memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah, menjamin pengembangan dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat, melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan

budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif dan memihak pada rakyat kecil;”

Adapun Tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dalam merealisasikan visi dan misi tersebut adalah “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”.

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.
2. Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan TIK.

Adapun hasil pengukuran keberhasilan atau kegagalan dalam capaian setiap sasaran Pembangunan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2019 dengan alat ukur Indikator Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan diukur melalui 5 (lima) Indikator Kinerja dengan capaian sebagai berikut :
 - a. Persentase cakupan pelaksanaan pengeluaran belanja daerah dapat dicapai sesuai dengan target sehingga persentasenya sebesar 100 %
 - b. Persentase besaran penerimaan PAD tidak dapat dicapai sesuai dengan target ini disebabkan kurangnya tenaga petugas dan SDM dalam hal pengelolaan pajak dan retribusi daerah, kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah serta belum tergarapnya potensi pajak daerah dan retribusi daerah di 4 kecamatan dengan maksimal sehingga persentase yang dapat dicapai sebesar 69,40 %
 - c. Persentase penyediaan pedoman dan dokumen APBK dapat dicapai sesuai dengan target sehingga persentasenya sebesar 100 %
 - d. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dapat dicapai sesuai dengan target predikat WTP sehingga capaian persentasenya sebesar 100 %

- e. Persentase laporan pengelolaan aset daerah dapat dicapai sesuai dengan target sehingga persentasenya sebesar 100 %
2. Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan TIK diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja dengan capaian sebagai berikut :
- a. Persentase cakupan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah dapat dicapai sesuai dengan target sehingga persentasenya sebesar 100 %

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
• Personil	5
• Sarana dan Prasarana	6
• Pendapatan dan Pembiayaan	7
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. RENCANA STRATEGIS	10
• Visi dan Misi	10
• Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	12
• Program dan Kegiatan	14
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019	19
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019	25
B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019	31

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2019	41
BAB IV PENUTUP	48

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Matriks Rencana Strategis (RS) Tahun 2017-2022;
2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2019;
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019;
4. Lampiran lainnya.

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 1.1.	Jumlah Personil	5
2.	Tabel 1.2.	Sarana dan Prasarana	6
3.	Tabel 1.3.	Pendapatan	8
4.	Tabel 1.4.	Pembiayaan	8
5.	Tabel 2.1.	Misi – Tujuan	13
6.	Tabel 2.2.	Tujuan – Sasaran	14
7.	Tabel 2.3.	Rencana Strategis BPKD Kota Lhokseumawe	18
8.	Tabel 2.4.	Sasaran dan Indikator Sasaran	19
9. ..	Tabel 2.5.	Kegiatan dan Indikator Kegiatan	20
10.	Tabel 2.6.	Matrik Perjanjian Kinerja BPKD Tahun 2019	24
11.	Tabel 3.1.	Skala Pengukuran Kinerja	26
12.	Tabel 3.2.	Data Penilaian Pencapaian Sasaran Tahun 2019	30
13.	Tabel 3.3.	Data Pencapaian Kegiatan Tahun 2019	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, berkewajiban menyampaikan LKj-IP sebagai bentuk pertanggung jawaban akuntabilitas publik atas tugas dan fungsi yang dibebankan kepada OPD.

Berikut ini diuraikan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP), dan sistematika penyajian LKj-IP.

Sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana dijelaskan bahwa Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Tahunan diantaranya adalah Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe merupakan tolok ukur OPD dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama satu tahun. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang daerah Kota Lhokseumawe. Adapun penyusunan LKj-IP Tahun 2019 ini mengacu pada RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017 – 2022 dengan

memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sama dengan yang telah ditetapkan dalam RENSTRA yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2019 adalah sebagai penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kota Lhokseumawe yang dituangkan dalam program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dengan memperhatikan tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2019 adalah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh BPKD Kota Lhokseumawe melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

C. Gambaran Umum Organisasi

Dalam melaksanakan Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok "Melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah".

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. penyusunan rencana dan program kerja dinas;
- c. perumusan dan penyusunan kebijakan umum dan teknis di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang kesekretariatan, pendapatan asli daerah non pajak bumi dan bangunan, pajak bumi dan bangunan dan BPHTB, anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset;
- e. pengelolaan pendapatan asli daerah non pajak bumi dan bangunan;
- f. pengelolaan pajak bumi dan bangunan dan BPHTB;
- g. pelaksanaan tugas pembantuan di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
- h. pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi keuangan daerah;
- i. pengelolaan aset daerah;
- j. pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kearsipan;
- k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja lain;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

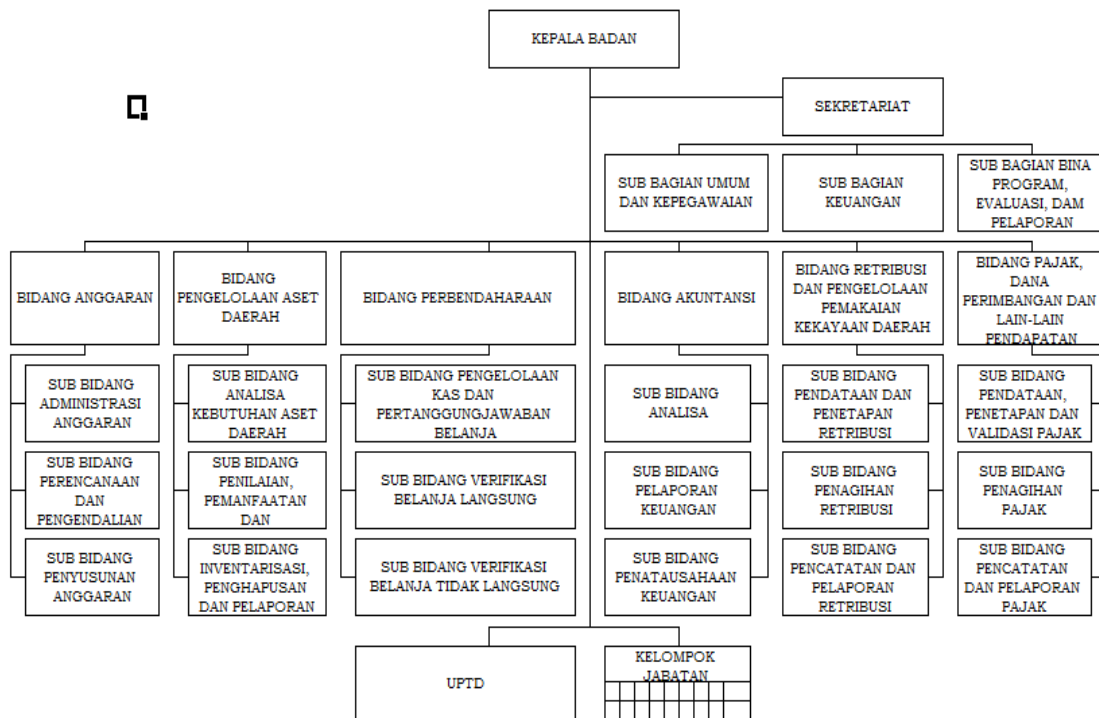
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe terdapat susunan organisasi yang terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Anggaran;
4. Bidang Pengelolaan Aset Daerah;

5. Bidang Perbendaharaan;
6. Bidang Akuntansi;
7. Bidang Retribusi dan Pengelolaan Pemakaian Kekayaan Daerah;
8. Bidang Pajak, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan;
9. UPTD; dan
10. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dalam bentuk bagan struktur adalah sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWA



Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi baik secara administrasi maupun operasional pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, perlu adanya dukungan Personil, Sarana dan Prasarana, Pendapatan serta Pembiayaan sebagai berikut :

- **Personil.**

Dalam menjalankan kedudukan, tugas dan fungsinya perlu adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan tingkat pendidikan, pangkat dan golongannya. Kondisi kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe hingga akhir Desember 2019 secara singkat dipaparkan dalam tabel berikut :

Tabel. 1.1
Jumlah Personil

No.	JABATAN STRUKTURAL	JUM LAH	PANGKAT / GOL RUANG	JUM LAH	PENDIDI KAN FORMAL	JUM LAH	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala Badan	1	Pembina Tk. I (IV/b)	1	S2	1	
2	Sekretaris	1	Pembina Tk. I (IV/b)	1	S1	1	
3	Kabid	6	Pembina (IV/a)	3	S2	3	
			Pembina (IV/a)	1	S1	1	
			Penata Tk. I (III/d)	2	S1	2	
4	Kasubbag	3	Penata (III/c)	2	S1	2	
			Penata Muda Tk.I (III/b)	1	S1	1	
5	Kasubbid	18	Pembina (IV/a)	1	S1	1	
			Penata Tk. I (III/d)	5	S1	5	
			Penata (III/c)	2	S2	2	
			Penata (III/c)	6	S1	6	
			Penata Muda Tk. I (III/b)	1	S2	1	
			Penata Muda Tk. I (III/b)	2	S1	2	
			Penata Muda (III/a)	1	S1	1	Plt
6	Staf	48	Penata Tk. I, (III/d)	1	S1	1	
			Penata, (III/c)	3	S1	3	
			Penata Muda Tk. I (III/b)	12	S1	12	
			Penata Muda, (III/a)	9	S1	9	
			Penata, (III/c)	2	D-III	2	
			Penata Muda Tk. I (III/b)	2	D-III	2	
			Penata Muda, (III/a)	2	D-III	2	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pengatur Tk. I, (II/d)	1	D-III	1	
			Penata Muda Tk. I (III/b)	1	SMA	1	
			Penata Muda, (III/a)	3	SMA	3	
			Pengatur Tk. I, (II/d)	3	SMA	3	
			Pengatur, (II/c)	5	SMA	5	
			Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1	SMA	1	
			Pengatur Muda, (II/a)	1	SMA	1	
			Juru, (I/c)	1	SMP	1	
			Juru Muda Tk. I (I/b)	1	SMP	1	
Jumlah		77		77		77	

- **Sarana dan Prasarana**

Guna menunjang kegiatan-kegiatan di bidang pengelolaan keuangan daerah diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia dan dimanfaatkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe hingga akhir Desember 2019 secara singkat dipaparkan dalam tabel berikut :

Tabel. 1.2
Sarana dan Prasarana

No	Jenis	Jumlah
1	2	3
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2 Unit
2	Mini Bus	8 Unit
3	Sepeda Motor	53 Unit
4	Lemari Penyimpanan	2 Unit
5	Mesin Listrik Standart	1 Unit
6	Mesin Calculator	42 Unit
7	Lemari Besi	4 Unit
8	Rak Besi / Metal	2 Unit
9	Filling Besi / Metal	6 Unit
10	Brandkas	2 Unit
11	Lemari Kaca	8 Unit
12	Lemari Kayu	4 Unit
13	Meja Rapat	1 Unit
14	Kursi Rapat	12 Unit

1	2	3
15	Kursi Tamu	2 Unit
16	Kursi Biasa	100 Unit
17	Meja Biro	7 Unit
18	Sofa	9 Unit
19	Mesin Penghisap Debu	1 Unit
20	AC Unit	23 Unit
21	AC Split	19 Unit
22	Exchause Pen	16 Unit
23	Televisi	13 Unit
24	Wireless	5 Unit
25	Dispenser	5 Unit
26	PC Unit	80 Unit
27	Laptop	25 Unit
28	Notebook	21 Unit
29	Printer	60 Unit
30	Hardisk Exsternal	5 Unit
31	Server	4 Unit
32	Router	2 Unit
33	Meja Kerja Pejabat Eselon II	3 Unit
34	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	25 Unit
35	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	1 Unit
36	Meja Tamu Ruangan Biasa	2 Unit
37	Kursi Kerja Pejabatan Eselon II	1 Unit
38	Kursi Kerja Pejabatan Eselon III	7 Unit
39	Kursi Kerja Pejabatan Eselon IV	21 Unit
40	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	17 Unit
41	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	64 Unit
42	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1 Unit
43	Buffet Kayu	2 Unit
44	Projector + Attacment	10 Unit
45	UPS	36 Unit
46	Sound System	4 Unit
47	Mixer	1 Unit
48	Prescision Filling Machine	3 Unit
49	Personal Komputer	1 Unit
50	CCTV	21 Unit
51	Peralatan Jaringan Lain-lain	22 Unit
52	Tangga Aluminium	1 Unit

• **Pendapatan dan Pembiayaan**

Rincian pendapatan dan pembiayaan yang terdapat pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2019, secara singkat tersaji dalam tabel berikut :

**TABEL : 1.3
PENDAPATAN**

No	U R A I A N	JUMLAH	KET
1.	PAD BPKD TA 2019		
	• Pendapatan Pajak Daerah	Rp. 34.282.500.000,00	
	• Hasil Retribusi Daerah	Rp. 1.768.000.000,00	
	• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp. 6.000.000.000,00	
	• Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp. 8.950.000.000,00	
	Jumlah PAD BPKD	Rp. 51.000.500.000,00	

**TABEL : 1.4
PEMBIAYAAN**

No	U R A I A N	JUMLAH	KET
1	DPA BPKD TA 2019		
	• Belanja Tidak Langsung	Rp. 12.752.872.329,00	
	• Belanja Langsung	Rp. 10.856.568.462,00	
	Jumlah DPA BPKD	Rp. 23.609.440.791,00	

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

B. MAKSUD DAN TUJUAN

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

- Personil;
- Sarana dan Prasarana;
- Pendapatan dan Pembiayaan.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKj-IP

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

- Visi dan Misi
- Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran.
- Program dan Kegiatan.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2019

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Matriks Rencana Strategis (RS) Tahun 2017-2022;
2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2019;
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2019;
4. Lampiran lainnya, Penghargaan dll.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, mempunyai kebijakan dan program yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Kebijakan dan program dimaksud pelaksanaannya direncanakan dari pembiayaan melalui dana APBK yang berorientasi di bidang pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah.

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategik Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yang akan dijelaskan dalam rencana kinerja tahun 2019.

1. Visi dan Misi.

Perumusan visi dan misi jangka menengah Kota Lhokseumawe merupakan salah satu tahapan penting dalam penyusunan RPJMD. Selain itu, visi juga menjelaskan cara pandang jauh kedepan yang didalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan bagaimana Kota Lhokseumawe harus dibawa dan diarahkan agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif pada masa yang akan datang untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe. Jadi visi Pemerintah Kota Lhokseumawe adalah cita-cita yang menggambarkan akan dibawa kemana Kota Lhokseumawe dimasa mendatang, dan visi selalu berpijak dari kondisi, potensi, masalah, tantangan, hambatan dan tuntutan masyarakat. Adapun visi Kota Lhokseumawe adalah :

“TERWUJUDNYA KOTA LHOKSEUMAWE BERSYARIAT, SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA BERDASARKAN UU-PA DAN MOU HELSINKI”

Pengertian pokok unsur-unsur yang terkandung dalam Visi Daerah Kota Lhokseumawe tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Bersyariat, mengandung pengertian bahwa segenap aspek kehidupan masyarakat dan tata kelola pemerintahan dilandasi oleh nilai-nilai Agama Islam;
2. Sehat mengandung pengertian bahwa lingkungan hidup dan masyarakat Kota Lhokseumawe yang teratur bersih dan sehat;
3. Cerdas mengandung pengertian bahwa sumber daya manusia di Kota Lhokseumawe yang berkarakter dan berwawasan global;
4. Sejahtera mengandung pengertian terpenuhinya kebutuhan masyarakat Kota Lhokseumawe baik materil maupun spiritual;

Untuk mendukung terwujudnya visi tersebut, maka Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui BPKD menjalankan **Misi** sebagai berikut :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*Clean and Good Governance*), demokrasi yang berlandaskan hukum, yaitu peningkatan kinerja serta peningkatan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi penetapan kebijakan dan regulasi, pembinaan aparatur, pengembangan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Demikian pula, memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah, menjamin pengembangan dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat.

2. Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi tersebut diatas, perlu ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan dan sasaran ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe. Adapaun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

- **Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Adapun **Tujuan** yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dalam merealisasikan visi dan misi adalah sebagai berikut : ***"Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik "***.

- **Indikator Tujuan**

Indikator tujuan yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut :

1. Kategori Reformasi Birokrasi.

- **Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi

pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun **Sasaran** yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan.
- b. Meningkatnya pengembangan dan Pemanfaatan TIK.

• **Indikator Sasaran**

Indikator Sasaran yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut :

- 1. Cakupan pelaksanaan pengeluaran belanja daerah.
- 2. Besaran penerimaan PAD.
- 3. Cakupan penyediaan pedoman dan Dokumen APBK.
- 4. Opini BPK Laporan Keuangan Daerah.
- 5. Cakupan laporan pengelolaan aset daerah.
- 6. Cakupan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah.

Tabel 2.1
MISI – TUJUAN

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	
Misi	Mewujudkan Kota Lhokseumawe dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (Clean and Good Governance), demokrasi yang berlandaskan hukum		
Tujuan :			
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	a.	Kategori Reformasi Birokrasi	

Tabel 2.2
TUJUAN – SASARAN

SASARAN		INDIKATOR SASARAN
Tujuan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
<i>Sasaran Strategis 1 :</i>		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 	Cakupan pelaksanaan pengeluaran belanja daerah Besaran penerimaan PAD Cakupan penyediaan pedoman dan Dokumen APBK Opini BPK Laporan Keuangan Daerah Cakupan laporan pengelolaan aset daerah
<i>Sasaran Strategis 2 :</i>		
Meningkatnya pengembangan dan Pemanfaatan TIK	<ol style="list-style-type: none"> 1. 	Cakupan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah

3. Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe pada tahun 2019 untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah terdapat 10 program dan 66 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- 1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 1. Penyediaan jasa surat menyurat
 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 4. Penyediaan alat tulis kantor
 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 8. Penyediaan makanan dan minuman
 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 10. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap
- 2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 1. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
 2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor
 - 3). Program peningkatan disiplin aparatur
 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 - 4). Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja
 1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah
 2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
 - 5). Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Daerah
 1. Verifikasi Dokumen penggajian Pemerintah Kota Lhokseumawe
 2. Penataan Fungsi Pengelolaan Kas
 - 6). Prgram Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah
 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak
 2. Penagihan Rutin Tunggalan Retribusi Daerah
 3. Pendataan, Penetapan Retribusi Daerah dan Pemakaian Kekayaan Daerah
 4. Pelaporan dan Verifikasi Piutang Retribusi Daerah

- 7). Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
 1. Penyusunan standar satuan harga
 2. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBK
 3. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBK
 4. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
 5. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD dan DPPA SKPD
 6. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
 7. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
 8. Penyusunan Standar Kebutuhan Umum
 9. Penyusunan Buku Pedoman Penyusunan RKA dan DPA SKPD
 10. Pembinaan / Pergeseran Anggaran
 11. Peningkatan manajemen keuangan daerah
 12. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe
 13. Manajemen Pengelolaan SIMDA Keuangan
 14. Bimtek Pengelolaan Aplikasi SIMDA Keuangan
 15. Pelayanan Validasi dan Verifikasi SSPD BPHTB
 16. Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak
 17. Verifikasi Lapangan dan Penilaian Individu Data Objek Pajak dan Zona Nilai Tanah PBB
 18. Pengelolaan Pelaporan Keuangan
 19. Pemetaan Akun Pendapatan dan Belanja
 20. Penyusunan Saldo Awal Laporan Keuangan
 21. Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Wajib Pajak
 22. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
 23. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

- 24. Penyusunan Perubahan KUA
- 25. Penyusunan Perubahan PPAS
- 8). Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah
 - 1. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran
 - 2. Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD
- 9). Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kekayaan Daerah
 - 1. Penyusunan Buku Inventaris Aset Daerah
 - 2. Inventarisasi dan Sertifikasi Barang/Aset Daerah
 - 3. Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi PPKD
 - 4. Pemeliharaan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak
 - 5. Penghapusan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak
 - 6. Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah dengan SKPD di Jajaran Pemerintah Kota Lhokseumawe
 - 7. Rekonsiliasi Aset Lancar dengan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe
 - 8. Pengelolaan Aplikasi Persediaan
 - 9. Pengelolaan Aplikasi SIMDA BMD
 - 10. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - 11. Verifikasi dan Penelitian Belanja Bantuan
 - 12. Perancangan Peraturan Walikota tentang Barang Milik Daerah
 - 13. Buku Status Barang Milik Daerah
- 10). Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
 - 1. Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Sesuai dengan uraian tersebut diatas maka sasaran - sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima Tahun adalah seperti berikut :

Tabel 2.3.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kota Lhokseumawe

SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN KE					Target Akhir RPJM
		1	2	3	4	5	
Meningkatkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelaksanaan Pengeluaran Belanja Daerah	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln
	Besaran Penerimaan PAD	45,54 Milyar	47,50 Milyar	49,20 Milyar	49,20 Milyar	49,20 Milyar	49,20 Milyar
	Cakupan Penyediaan Pedoman dan Dokumen APBK	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok
	Opini BPK Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Cakupan Laporan Pengelolaan Aset Daerah	8 Dok	8 Dok	8 Dok	8 Dok	8 Dok	8 Dok
Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan TIK	Cakupan Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019

Rencana Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe merupakan proses penetapan kegiatan dengan cara mencapai tujuan dan sasaran yang berfokus pada kebijakan dan program, kemudian ditetapkan dalam rencana strategik yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2019.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2019 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut :

- **Sasaran dan Indikator Sasaran**

Untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe perlu ditetapkan indikator sasaran sebagai berikut :

Tabel : 2.4

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

No	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Cakupan pelaksanaan pengeluaran belanja daerah
		Besaran penerimaan PAD
		Cakupan penyediaan pedoman dan Dokumen APBK
		Opini BPK Laporan Keuangan Daerah
		Cakupan laporan pengelolaan aset daerah
2.	Meningkatnya pengembangan dan Pemanfaatan TIK	Cakupan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah

- **Program dan Kegiatan**

Untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut :

1. Program

- a. Pelayanan administrasi perkantoran;
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- c. Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat daerah
- e. Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Daerah
- f. Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah
- g. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- h. Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah
- i. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kekayaan Daerah
- j. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota

2. Kegiatan dan Indikator Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan program yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe perlu didukung dengan adanya kegiatan yang nantinya dapat mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah. Adapun kegiatan dan indikator kegiatan yang ingin di capai adalah sebagai berikut :

Tabel : 2.5
Kegiatan dan Indikator Kegiatan

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan
1	2	3
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pejabat Pengelolaan Keuangan BPKD (50 Org x 12 Bulan)
4	Penyediaan alat tulis kantor	Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Periode Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1	2	3
6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Periode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang - Undangan (1 Eks x 365 Hari)
8	Penyediaan makanan dan minuman	Periode Penyediaan makanan dan Minuman
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Periode Rapat- Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah
10	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap (150 Org x 10 Bulan)
11	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
12	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
14	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (7 Unit x 12 Bulan)
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode pemeliharaan ruti/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor	Periode pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor
17	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya
18	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku RENJA SKPD
19	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen SOP SKPD
20	Verifikasi Dokumen penggajian Pemerintah Kota Lhokseumawe	Periode pengelolaan penggajian Pemkot Lhokseumawe
21	Penataan Fungsi Pengelolaan Kas	Periode Penataan Fungsi Pengelolaan Kas
22	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak	Periode Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak
23	Penagihan Rutin Tunggalan Retribusi Daerah	Periode Penagihan Rutin Tunggalan Retribusi Daerah
24	Pendataan, Penetapan Retribusi Daerah dan Pemakaian Kekayaan Daerah	Periode Penataan Wajib Retribusi
25	Pelaporan dan Verifikasi Piutang Retribusi Daerah	Periode Pelaporan Piutang Restribusi Daerah
26	Penyusunan standar satuan harga	Jumlah Buku Standar Satuan Harga (SSH)
27	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBK	Jumlah Dokumen Rancangan, Rencana dan Qanun APBK

1	2	3
28	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBK	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBK dan DPPA SKPD
29	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Jumlah Dokumen Rancangan, Rencana dan Qanun P - APBK
30	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD dan DPPA SKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBK
31	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Qanun Tentang Pertanggung Jawaban APBK 2018
32	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Qanun dan Rancangan Peraturan KDH Tentang Pejabaran Pertanggung Jawaban APBK
33	Penyusunan Standar Kebutuhan Umum	Jumlah Dokumen Penyusunan Standar Kebutuhan Umum
34	Penyusunan Buku Pedoman Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah Buku Penyusunan dan Pedoman RKA - DPA SKPD
35	Pembinaan / Pergeseran Anggaran	Jumlah SKPD Yang Melaksanakan Pembinaan/Pergeseran Anggaran
36	Peningkatan manajemen keuangan daerah	Jumlah Dokumen Laporan DAK Fisik dan DAK Non Fisik dan Buku Register
37	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah Rancangan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe
38	Manajemen Pengelolaan SIMDA Keuangan	Periode Pengelolaan Aplikasi SIMDA
39	Bimtek Pengelolaan Aplikasi SIMDA Keuangan	Jumlah Peserta Bimtek SKPD Pengelola Aplikasi SIMDA Keuangan
40	Pelayanan Validasi dan Verifikasi SSPD BPHTB	Periode Pelayanan Validasi dan Verifikasi SSPD BPHTB
41	Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak	Jumlah Blangko SPPT PBB, SSPD PBB dan DHKP
42	Verifikasi Lapangan dan Penilaian Individu Data Objek Pajak dan Zona Nilai Tanah PBB	Jumlah Peta Blok 4 Kecamatan
43	Pengelolaan Pelaporan Keuangan	Periode Pengelolaan Laporan Keuangan
44	Pemetaan Akun Pendapatan dan Belanja	Jumlah Dokumen Akun Pendapatan dan Belanja
45	Penyusunan Saldo Awal Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Saldo Awal Laporan Keuangan
46	Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Wajib Pajak	Periode Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Wajib Pajak
47	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	Jumlah Buku Rancangan KUA dan Nota Kesepakatan KUA
48	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Jumlah Buku Rancangan PPAS dan Nota Kesepakatan PPAS
49	Penyusunan Perubahan KUA	Jumlah buku KUA perubahan dan Nota kesepakatan KUA

1	2	3
50	Penyusunan Perubahan PPAS	Jumlah Buku PPAS Perubahan dan Nota Kesepakatan PPAS
51	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran	Jumlah Buku Laporan Realisasi Anggaran
52	Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD
53	Penyusunan Buku Inventaris Aset Daerah	Jumlah Buku Inventaris Aset Daerah
54	Inventarisasi dan Sertifikasi Barang/Aset Daerah	Periode Inventarisasi, Sertifikat Barang / Aset Daerah
55	Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi PPKD	Periode Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi PPKD
56	Pemeliharaan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak	Periode Pemeliharaan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak
57	Penghapusan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak	Periode Penghapusan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak
58	Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah dengan SKPD di Jajaran Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah SKPD Yang Melakukan Rekonsiliasi Laporan BMD
59	Rekonsiliasi Aset Lancar dengan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah SKPD Yang Melakukan Rekonsiliasi Aset Lancar
60	Pengelolaan Aplikasi Persediaan	Periode Pengelolaan Aplikasi Persediaan
61	Pengelolaan Aplikasi SIMDA BMD	Periode Pengelolaan Aplikasi SIMDA BMD
62	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Buku RKBMD
63	Verifikasi dan Penelitian Belanja Bantuan	Periode Verifikasi dan Penelitian Dokumen Belanja Bantuan
64	Perancangan Peraturan Walikota tentang Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Perwal Tentang Barang Milik Daerah
65	Buku Status Barang Milik Daerah	Jumlah Buku Status Barang Milik Daerah
66	Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Periode Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan

dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe telah membuat perjanjian kinerja tahun 2019 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2019. Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2019 disusun mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019 yang telah ditetapkan. Adapun penyajian Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja) secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 2.6

Matrik Pejanjian Kinerja
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe
Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelaksanaan Pengeluaran Belanja Daerah	12	Bulan
	Besaran Penerimaan PAD	47,50	Milyar
	Cakupan Penyediaan Pedoman dan Dokumen APBK	7	Dokumen
	Opini BPK Laporan Keuangan	WTP	Opini
	Cakupan Laporan Pengelolaan Aset Daerah	8	Dokumen
Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan TIK	Cakupan Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	12	Bulan

Untuk data perjanjian kinerja terinci dapat dilihat pada Lampiran (Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

LKj-IP disusun oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe sebagai wujud dari keinginan yang kuat untuk meningkatkan performan organisasi dilingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Oleh karena itu pengukuran terhadap capaian kinerja yang dihasilkan oleh seluruh jajaran manajemen Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, menjadi suatu kebutuhan bagi organisasi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam melakukan perbaikan di masa yang akan datang.

Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit organisasi dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Pelaksanaan tugas tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolok ukur keluaran dan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja diperlukan tolok ukur atau indikator kinerja. Capaian indikator kinerja ini akan dinilai, dianalisa dan dievaluasi tingkat keberhasilannya. Analisa dan evaluasi yang dilakukan disajikan menurut sasaran yang ada dalam Renstra OPD.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Pengukuran capaian kinerja tahun 2019 merupakan hasil kegiatan yang dicapai dengan membandingkan antara target capaian kinerja dengan realisasi capaian kinerja yang dihasilkan. Suatu kegiatan dapat dikatakan berhasil apabila realisasi yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Adapun rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100 \%$$

Untuk mengukur rencana keberhasilan capaian kinerja digunakan instrument pengukuran ordinal berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor : 7 Tahun 2018, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022, dengan memperhitungkan indikator masukan, keluaran, dan hasil. Skala pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1
SKALA PENGUKURAN KINERJA

No.	Jumlah Nilai	Kategori
1	85 sampai dengan 100	Sangat berhasil
2	70 s/d kurang dari 85	Berhasil
3	55 s/d kurang dari 70	Cukup
4	Kurang dari 55	Kurang

1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019

Dalam melakukan pengukuran kinerja dari ke dua sasaran yang ditentukan, dapat dilihat pada masing-masing indikator sasaran sebagai berikut :

- 1) **Sasaran 1**, Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan
Untuk mencapai sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan, pada tahun 2019 dilaksanakan 5 program yaitu :
 1. Program Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Daerah

Program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator sasaran sebagai berikut :

- Cakupan pelaksanaan pengeluaran belanja daerah :

Target yang ditetapkan pada tahun 2019 untuk melakukan validasi data gaji PNSD se Kota Lhokseumawe dan penyiapan bahan pelaksanaan APBD serta melakukan pembinaan pengelolaan keuangan SKPD dengan target yang ditetapkan selama 12 bulan, target ini sama dengan realisasi yaitu 12 bulan sehingga persentase pelaksanaan dapat dicapai sebesar 100,00%.

2. Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah

Program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator sasaran sebagai berikut :

- Besaran penerimaan PAD :

Target yang ditetapkan pada tahun 2019 untuk menilai jumlah besaran PAD yang diterima pada tahun anggaran 2019 dengan target yang ditetapkan setelah perubahan anggaran pendapatan sebesar Rp. 51.000.500.000,- Target ini lebih rendah dari realisasi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 35.392.295.659,86,- sehingga persentase pelaksanaan dapat dicapai 69,40 %.

Penurunan PAD ini disebabkan kurangnya tenaga petugas dan SDM dalam hal pengelolaan pajak dan retribusi daerah, kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah serta belum tergarapnya potensi pajak daerah dan retribusi daerah di 4 kecamatan dengan maksimal

3. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator sasaran sebagai berikut :

- Cakupan penyediaan pedoman dan dokumen APBK:

Target yang ditetapkan pada tahun 2019 untuk menilai penyediaan dokumen tentang pelaksanaan APBK, berupa bahan petunjuk teknis pelaksanaan APBK, Dokumen Rancangan Penjabaran APBK, Petunjuk Teknis Penyusunan Pelaksanaan Perubahan APBK, Rancangan Penjabaran Perubahan APBK, Dokumen DAK Fisik, Non Fisik dan Buku Register, Pemetaan Akun Pendapatan dan Belanja serta Dokumen penyusunan dan Penginputan Saldo Awal Laporan Keuangan dengan target yang ditetapkan sebanyak 7 Dokumen, Target ini sama dengan realisasi yaitu sebanyak 7 Dokumen, sehingga persentase pelaksanaan dapat dicapai 100,00%.

4. Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah.

Program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator sasaran sebagai berikut :

- Opini BPK Laporan Keuangan :

Target yang ditetapkan pada tahun 2019 untuk menilai Opini BPK Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Lhokseumawe, melakukan validasi data yang akurat dengan SKPD sehingga diperoleh data yang valid, transparan dan akuntabel dengan target yang ditetapkan WTP, target ini sama dengan realisasi yaitu WTP sehingga persentase pelaksanaan dapat dicapai sebesar 100,00%.

5. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kekayaan Daerah

Program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator sasaran sebagai berikut :

- Cakupan laporan pengelolaan aset daerah :

Target yang ditetapkan pada tahun 2019 untuk menilai dokumen pengelolaan kekayaan daerah berupa pedoman penyusunan inventarisasi daerah, Inventarisasi barang milik daerah, pencatatan barang-barang yang rusak, validasi data barang milik daerah, validasi data aset lancar dengan SKPD, kebutuhan barang milik daerah, penyusunan rancangan perwal tentang barang milik daerah serta penyusunan buku status barang milik daerah dengan target yang ditetapkan sebanyak 8 dokumen, target ini sama dengan realisasi sebanyak 8 dokumen sehingga persentase pelaksanaan dapat dicapai sebesar 100,00%.

2) **Sasaran 2**, Meningkatnya pengembangan dan Pemanfaatan TIK Untuk mencapai sasaran Meningkatnya pengembangan dan Pemanfaatan TIK, pada tahun 2019 dilaksanakan 1 program yaitu :

1. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota

Program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator sasaran sebagai berikut :

- Cakupan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah :

Target yang ditetapkan pada tahun 2019 untuk menilai pelaksanaan pelayanan pengelolaan jaringan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dengan target yang ditetapkan selama 12 bulan, target ini sama dengan realisasi

yaitu 12 bulan sehingga persentase pelaksanaan dapat dicapai sebesar 100,00%.

TABEL : 3.2

DATA PENILAIAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2019

No	SASARAN		CAPAIAN TAHUN 2019			KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TAR-GET	REALI SASI	%	
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Cakupan pelaksanaan pengeluaran belanja daerah	12 Bln	12 Bln	100,00%	Sangat Berhasil
		Besaran penerimaan PAD	51,001 Milyar	35,392 Milyar	69,40%	Cukup
		Cakupan penyediaan pedoman dan Dokumen APBK	7 Dok	7 Dok	100,00%	Sangat Berhasil
		Opini BPK Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	100,00%	Sangat Berhasil
		Cakupan laporan pengelolaan aset daerah	8 Dok	8 Dok	100,00%	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya pengembangan dan Pemanfaatan TIK	Cakupan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah	12 Bln	12 Bln	100,00%	Sangat Berhasil
Tingkat Capaian Indikator Kinerja					94,90%	Sangat Berhasil

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran satu dan dua mencerminkan keberhasilan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe yang mencapai target 94,90% dalam kategori **Sangat Berhasil**

2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN RPJMD DAN PROGRAM PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2006

Realisasi kinerja pada tahun 2019 selaras dengan Program Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dengan Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 sebagaimana diatur dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor : 7 Tahun 2018, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022.

Realisasi Kinerja pada tahun 2019 pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dengan 2 sasaran strategis dan 6 indikator kinerja yang direalisasikan dengan 10 program dan 66 kegiatan telah selaras dengan RPJMD Kota Lhokseumawe tahun 2017-2022 dan program Permendagri 13/2006.

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019.

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe selama Tahun 2019. Capaian kinerja Tahun 2019 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dimana tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan pengidentifikasian sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

➤ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah ditetapkan.**

Dari 6 indikator sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe kesemuanya telah memenuhi target yang ditetapkan baik dalam RPJMD maupun dalam Renstra SKPD, akan tetapi terdapat 1 indikator sasaran yang realisasinya dibawah target yang ditetapkan yaitu pada indikator sasaran :

- Besaran Penerimaan PAD, Target yang ditetapkan pada tahun 2019 untuk menilai prosentase penerimaan PAD Pemerintah Kota Lhokseumawe adalah sebesar Rp. 51.000.500.000,- Target ini lebih rendah dari realisasi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 35.392.295.659,86, sehingga persentase yang diperoleh sebesar 69,40%. Penurunan PAD ini disebabkan kurangnya tenaga petugas dan SDM dalam hal pengelolaan pajak dan retribusi daerah, kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah serta belum tergarapnya potensi pajak daerah dan retribusi daerah di 4 kecamatan dengan maksimal

Akan tetapi meski capaian kinerja tahun 2019 sesuai dengan target maupun penurunan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun Renstra SKPD, namun masih ada permasalahan yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe adalah :

- a) Masih ada beberapa asset milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang berlokasi di Kota Lhokseumawe sampai saat ini belum diserahkan kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe;
- b) Masih adanya beberapa SKPD dalam menyerap / merealisasikan anggaran kegiatan tidak sesuai dengan anggaran kas yang telah

disusun, sehingga mengalami penumpukan penyerapan anggaran pada triwulan IV khususnya penyerapan pada bulan Desember;

- c) Terbatasnya SDM pengolah data membuat proses akuntansi di beberapa SKPD mengalami hambatan / permasalahan;

Adapun solusi yang dilakukan adalah :

- a) Mengajukan permohonan penyerahan pengalihan asset dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sehingga asset tersebut dapat dimanfaatkan dan dipelihara secara optimal;
- b) Melakukan pembinaan secara periodik kepada PPTK SKPD agar dalam penyerapan anggaran kegiatan berpedoman pada rencana awal penyusunan anggaran kas sehingga tidak terjadi penumpukan penyerapan anggaran / tidak terjadi keterlambatan penyerapan anggaran;
- c) Meningkatkan kualitas SDM di SKPD melalui pelatihan/pembinaan yang dilakukan secara intensif dan efektif;
- d) Mengirimkan surat dan melakukan koordinasi dengan SKPD agar segera melakukan edit data asset tetap dan memantau verifikasi data asset.

➤ **Analisis Efisiensi penggunaan Sumber Daya (Dana, Sarana Prasarana dan SDM).**

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 10.856.568.462,00,- telah dilakukan efisiensi dalam penggunaannya sebesar Rp. 10.196.331.527,00,- sehingga terdapat saldo/sisa anggaran sebesar Rp. 660.236.935,00,-. Sarana dan

prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik dalam RPJMD, Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe. Sumber daya aparatur yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe berjumlah 78 orang, jumlah personil tersebut dioptimalkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Lhokseumawe yang disesuaikan dengan tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe.

➤ **Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.**

Program dan kegiatan penunjang keberhasilan capaian target kinerja tidak terlepas dari sistem perencanaan yang mengacu dari target kinerja sasaran yang ingin dicapai. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe mempunyai 10 (Sepuluh) program dan 66 (Enam puluh enam) kegiatan untuk menunjang pencapaian target sasaran.

Adapun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
4. Penyediaan alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 8. Penyediaan makanan dan minuman
 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 10. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap
- 2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
 2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor
- 3). Program peningkatan disiplin aparatur
Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- 4). Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja
Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah
 2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
- 5). Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Daerah
Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1. Verifikasi Dokumen penggajian Pemerintah Kota Lhokseumawe
 2. Penataan Fungsi Pengelolaan Kas

6). Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah

Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak
2. Penagihan Rutin Tunggalan Retribusi Daerah
3. Pendataan, Penetapan Retribusi Daerah dan Pemakaian Kekayaan Daerah
4. Pelaporan dan Verifikasi Piutang Retribusi Daerah

7). Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan standar satuan harga
2. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBK
3. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBK
4. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
5. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD dan DPPA SKPD
6. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
7. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
8. Penyusunan Standar Kebutuhan Umum
9. Penyusunan Buku Pedoman Penyusunan RKA dan DPA SKPD
10. Pembinaan / Pergeseran Anggaran
11. Peningkatan manajemen keuangan daerah
12. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe

13. Manajemen Pengelolaan SIMDA Keuangan
 14. Bimtek Pengelolaan Aplikasi SIMDA Keuangan
 15. Pelayanan Validasi dan Verifikasi SSPD BPHTB
 16. Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak
 17. Verifikasi Lapangan dan Penilaian Individu Data Objek Pajak dan Zona Nilai Tanah PBB
 18. Pengelolaan Pelaporan Keuangan
 19. Pemetaan Akun Pendapatan dan Belanja
 20. Penyusunan Saldo Awal Laporan Keuangan
 21. Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Wajib Pajak
 22. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
 23. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
 24. Penyusunan Perubahan KUA
 25. Penyusunan Perubahan PPAS
- 8). Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah
Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran
 2. Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD
- 9). Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kekayaan Daerah
Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1. Penyusunan Buku Inventaris Aset Daerah
 2. Inventarisasi dan Sertifikasi Barang/Aset Daerah
 3. Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi PPKD
 4. Pemeliharaan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak
 5. Penghapusan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak
 6. Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah dengan SKPD di Jajaran Pemerintah Kota Lhokseumawe

7. Rekonsiliasi Aset Lancar dengan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe
8. Pengelolaan Aplikasi Persediaan
9. Pengelolaan Aplikasi SIMDA BMD
10. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
11. Verifikasi dan Penelitian Belanja Bantuan
12. Perancangan Peraturan Walikota tentang Barang Milik Daerah
13. Buku Status Barang Milik Daerah

10). Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/kota

Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Dari 66 (Enam puluh enam) kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe terdapat 16 kegiatan yang realisasi nya kurang dari 90 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik secara keseluruhan proses kegiatannya realiasi kinerjanya telah maksimal dilakukan walaupun realisasi secara keuangan kegiatan tersebut tidak tercapai dikarenakan terdapat belanja telepon dan belanja kawat / faximili / internet dan pembayaran rekening listrik yang pembayarannya disesuaikan dengan tagihan faktur setiap bulannya dari PT.Telkom dan dari PLN.

2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

Secara keseluruhan proses kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan telah maksimal dilakukan dan dana pada kegiatan dimaksud telah efisien digunakan

3. Penyediaan Makanan dan Minuman.
Secara keseluruhan proses kegiatan penyediaan makanan dan minuman telah maksimal dilakukan dan dana pada kegiatan dimaksud telah efisien digunakan
4. Penyediaan jasa pegawai tidak tetap.
Secara keseluruhan proses kegiatan penyediaan jasa pegawai tidak tetap telah maksimal dilakukan dan dana pada kegiatan dimaksud telah efisien digunakan
5. Penyediaan jasa pegawai tidak tetap.
Secara keseluruhan proses kegiatan penyediaan jasa pegawai tidak tetap telah maksimal dilakukan dan dana pada kegiatan dimaksud telah efisien digunakan
6. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
Secara keseluruhan proses kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya telah maksimal dilakukan dan dana pada kegiatan dimaksud telah efisien digunakan
7. Penagihan Rutin Tunggalan Retribusi Daerah.
Secara keseluruhan proses kegiatan Penagihan Rutin Tunggalan Retribusi Daerah telah maksimal dilakukan dan dana pada kegiatan dimaksud telah efisien digunakan
8. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBK.
Realisasi kegiatan tersebut tidak tercapai dikarenakan penyampaian buku penjabaran APBK Tahun Anggaran 2020 baru selesai pada tanggal 30 Desember 2019 sehingga mengakibatkan realisasi dan serapan anggaran tidak maksimal.
9. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Secara keseluruhan proses kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD telah maksimal dilakukan dan dana pada kegiatan dimaksud telah efisien digunakan

10. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dan DPPA SKPD.

Secara keseluruhan proses kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dan DPPA SKPD telah maksimal dilakukan dan dana pada kegiatan dimaksud telah efisien digunakan

11. Penyusunan Standart Kebutuhan Umum.

Secara keseluruhan proses Penyusunan Standart Kebutuhan Umum telah maksimal dilakukan dan dana pada kegiatan dimaksud telah efisien digunakan

12. Penyusunan Buku Pedoman Penyusunan RKA dan DPA SKPD.

Secara keseluruhan proses Penyusunan Buku Pedoman Penyusunan RKA dan DPA SKPD telah maksimal dilakukan dan dana pada kegiatan dimaksud telah efisien digunakan

13. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).

Secara keseluruhan proses Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) telah maksimal dilakukan dan dana pada kegiatan dimaksud telah efisien digunakan

14. Penyusunan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS).

Secara keseluruhan proses Penyusunan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) telah maksimal dilakukan dan dana pada kegiatan dimaksud telah efisien digunakan

15. Penyusunan Perubahan KUA.

Secara keseluruhan proses Penyusunan Perubahan KUA telah maksimal dilakukan dan dana pada kegiatan dimaksud telah efisien digunakan

16. Penyusunan Perubahan PPAS.

Secara keseluruhan proses Penyusunan Perubahan PPAS telah maksimal dilakukan dan dana pada kegiatan dimaksud telah efisien digunakan

Adapun realisasi anggaran untuk kegiatan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.3.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2019

Akuntabilitas keuangan menunjukkan seberapa besar anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Lhokseumawe serta mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diembankan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe. Berikut adalah realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe pada tahun 2019 :

1. PENDAPATAN

Target Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe pada tahun 2019 sesuai perubahan anggaran ditetapkan sebesar Rp. 51.000.500.000,00,- target ini terinci sebagai berikut :

No.	Uraian	Target (Rp.)
1.	Pendapatan Asli Daerah	
	• Pendapatan Pajak Daerah	Rp. 34.282.500.000,00
	• Hasil Retribusi Daerah	Rp. 1.768.000.000,00
	• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp. 6.000.000.000,00
	• Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp. 8.950.000.000,00
	Jumlah Target PAD BPKD	Rp. 51.000.500.000,00

Dari target tersebut pada tahun 2019 berhasil direalisasikan pendapatan daerah sebesar Rp. 35.392.295.659,86,- Atau tercapai sebesar 69,40 % dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Target (Rp.)
1.	Pendapatan Asli Daerah	
	• Pendapatan Pajak Daerah	Rp. 28.475.036.318,27
	• Hasil Retribusi Daerah	Rp. 953.411.996,00
	• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp. 0
	• Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp. 6.963.847.345,59
	Jumlah Realisasi PAD BPKD	Rp. 35.392.295.659,86

2. BELANJA

Belanja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2018 setelah anggaran perubahan terdiri dari :

No.	Belanja	Anggaran (Rp.)
1.	Belanja Tidak Langsung	12.752.872.329,00
2.	Belanja Langsung	10.856.568.462,00
	Total	23.609.440.791,00

Dari plafond belanja tersebut pada tahun 2019 direalisasikan sebesar Rp. 22.186.633.577,00 Atau tercapai sebesar 93,97 % dengan rincian sebagai berikut :

No.	Belanja	Anggaran (Rp.)
1.	Belanja Tidak Langsung	11.990.302.050,00
2.	Belanja Langsung	10.196.331.527,00
	Total	22.186.633.577,00

Rincian belanja langsung tahun 2019 sebagaimana tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3

DATA PENCAPAIAN KEGIATAN TAHUN 2019

N O	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (%)	(%)
1	2	3	4	5
	BELANJA LANGSUNG			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.383.622.450	2.059.923.444	86,42
1	Penyediaan jasa surat menyurat	11.310.000	11.226.000	99,26
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	525.400.000	400.086.254	76,15
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	416.100.000	407.700.000	97,98
4	Penyediaan alat tulis kantor	119.800.000	119.152.840	99,46
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	34.400.000	30.522.000	88,73
6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20.611.750	20.611.750	100,00
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000	2.000.000	100,00
8	Penyediaan makanan dan minuman	69.900.000	46.862.500	67,04
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	307.500.000	306.748.900	99,76
10	Penyediaan Jasa Pegawai Tetap	876.600.700	715.013.200	81,57
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.890.131.762	1.863.605.018	98,60
1	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	772.000.000	769.505.780	99,68
2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	443.000.000	435.720.625	98,36

1	2	3	4	5
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	405.000.000	397.113.313	98,05
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	178.331.762	172.626.500	96,80
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.800.000	80.648.800	96,24
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor	8.000.000	7.990.000	99,88
	Program peningkatan disiplin aparatur	230.717.500	206.972.790	89,71
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	230.717.500	206.972.790	89,71
	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	16.500.000	14.672.000	88,92
1	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	1.500.000	1.500.000	100,00
2	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan	15.000.000	13.172.000	87,81
	Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Daerah	293.981.100	289.297.198	98,41
1	Verifikasi Dokumen penggajian Pemerintah Kota Lhokseumawe	118.862.400	116.534.198	98,04
2	Penataan Fungsi Pengelolaan Kas	175.118.700	172.763.000	98,65
	Prgram Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah	716.783.000	677.203.932	94,48
1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak	260.425.000	260.099.232	99,87
2	Penagihan Rutin Tunggalan Retribusi Daerah	230.909.600	203.606.400	88,18
3	Pendataan, Penetapan Retribusi Daerah dan Pemakaian Kekayaan Daerah	144.173.400	134.393.300	93,22
4	Pelaporan dan Verifikasi Piutang Retribusi Daerah	81.275.000	79.105.000	97,33
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	3.944.775.550	3.716.725.134	94,22
1	Penyusunan standar satuan harga	60.000.000	59.940.000	99,90
2	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBK	1.233.456.500	1.172.541.010	95,06

1	2	3	4	5
3	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBK	223.695.000	197.597.050	88,33
4	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	181.633.000	143.922.900	79,24
5	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD dan DPPA SKPD	183.575.500	159.967.100	87,14
6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	172.607.351	172.547.851	99,97
7	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	64.900.800	64.823.000	99,88
8	Penyusunan Standar Kebutuhan Umum	35.460.000	29.790.000	84,01
9	Penyusunan Buku Pedoman Penyusunan RKA dan DPA SKPD	48.260.000	38.902.000	80,61
10	Pembinaan / Pergeseran Anggaran	65.280.000	59.395.200	90,99
11	Peningkatan manajemen keuangan daerah	254.774.400	254.475.100	99,88
12	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe	150.931.049	145.416.523	96,35
13	Manajemen Pengelolaan SIMDA Keuangan	212.600.000	212.572.700	99,99
14	Bimtek Pengelolaan Aplikasi SIMDA Keuangan	73.000.000	64.742.900	88,69
15	Pelayanan Validasi dan Verifikasi SSPD BPHTB	159.071.000	159.053.200	99,99
16	Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak	189.056.000	187.397.500	99,12
17	Verifikasi Lapangan dan Penilaian Individu Data Objek Pajak dan Zona Nilai Tanah PBB	92.062.000	92.062.000	100,00
18	Pengelolaan Pelaporan Keuangan	32.300.000	32.297.000	99,99
19	Pemetaan Akun Pendapatan dan Belanja	13.500.000	12.799.900	94,81
20	Penyusunan Saldo Awal Laporan Keuangan	35.314.500	34.313.500	97,17

1	2	3	4	5
21	Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Wajib Pajak	309.492.400	300.276.300	97,02
22	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	30.888.100	27.437.000	88,83
23	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	48.024.350	35.470.100	73,86
24	Penyusunan Perubahan KUA	26.378.300	22.387.900	84,87
25	Penyusunan Perubahan PPAS	48.515.300	36.597.400	75,43
	Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah	164.842.500	163.528.500	99,20
1	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran	84.895.000	84.241.000	99,23
2	Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD	79.947.500	79.287.500	99,17
	Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kekayaan Daerah	1.095.414.600	1.084.616.711	99,01
1	Penyusunan Buku Inventaris Aset Daerah	30.000.000	29.923.200	99,74
2	Inventarisasi dan Sertifikasi Barang/Aset Daerah	105.725.000	104.130.000	98,49
3	Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi PPKD	99.896.800	95.302.835	95,40
4	Pemeliharaan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak	230.000.000	228.865.700	99,51
5	Penghapusan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak	35.000.000	34.950.000	99,86
6	Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah dengan SKPD di Jajaran Pemerintah Kota Lhokseumawe	49.896.000	49.895.100	100,00
7	Rekonsiliasi Aset Lancar dengan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe	50.000.000	49.893.000	99,79
8	Pengelolaan Aplikasi Persediaan	150.000.000	149.964.200	99,98
9	Pengelolaan Aplikasi SIMDA BMD	160.000.000	158.063.776	98,79
10	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	45.000.000	44.865.000	99,70
11	Verifikasi dan Penelitian Belanja Bantuan	49.896.800	48.824.100	97,85
12	Perancangan Peraturan Walikota tentang Barang Milik Daerah	40.000.000	39.981.000	99,95
13	Buku Status Barang Milik Daerah	50.000.000	49.958.800	99,92

1	2	3	4	5
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	119.800.000	119.786.800	99,99
1	Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	119.800.000	119.786.800	99,99
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	10.856.568.462	10.196.331.527	93,92

Untuk mewujudkan 66 (Enam puluh enam) kegiatan yang ditetapkan pada Tahun 2019, tersedia dana sebesar Rp. 10.856.568.462,00,- yang dibiayai dari APBK Tahun Anggaran 2019, dari dana tersebut diatas telah terealisasi sebesar Rp. 10.196.331.527,00,- atau tercapai sebesar 93,92 % sehingga terdapat sisa belanja sebesar Rp. 660.236.935,00 ,- atau sekitar 6,08 %

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) yang disusun Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe adalah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja tahun 2019 dan sebagai alat pengendalian dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. Dalam penyusunan LKj-IP tentunya memerlukan kajian analisa secara menyeluruh antara kemampuan Sumber Daya Manusia dengan faktor-faktor sumber daya lainnya guna untuk tercapainya tujuan.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dikategorikan sangat berhasil karena nilai capaiannya diatas standar penilaian skala ordinal sebagai komitmen kinerja. Rencana kinerja sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II tersebut diatas adalah merupakan penjabaran dari pada Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2017 – 2022. Dari sejumlah program dan kegiatan dimaksud secara umum telah dapat terealisasi dengan baik serta memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2017 – 2022 sebagaimana daftar analisis terlampir.

Akuntabilitas kinerja sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III, dimana tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan baik sehingga apa yang menjadi sasaran pencapaian kinerja telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini diharapkan sebagai alat pemacu bagi seluruh staf yang terlibat pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk lebih meningkatkan aktifitas dan kreatifitas seorang Pegawai Negeri, meningkatkan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban Visi dan Misi Organisasi untuk menuju Aparatur Pemerintah yang professional, bersih dan berwibawa serta sebagai pelayan masyarakat yang terbaik. Para penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) berikutnya diharapkan lebih meningkatkan perhatiannya terhadap Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset/Barang Daerah sehingga dapat tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah.

Lhokseumawe, Januari 2020

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,



AZWAR, SH, MAP

Pembina Utama Muda
NIP. 19630925 200212 1 003



**LKj-IP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2020**

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Matriks Rencana Strategis (RS) Tahun 2017-2022.
2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2019.
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019.
4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
5. Lampiran Lainnya.

**MATRIKS RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2017- 2022**

Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe

Visi : "Mewujudkan Kota Lhokseumawe yang Bersyariat, Sehat, Cerdas dan Sejahtera berdasarkan UUPA dan MoU Helsinki"

Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik (Clean And Good Governance)

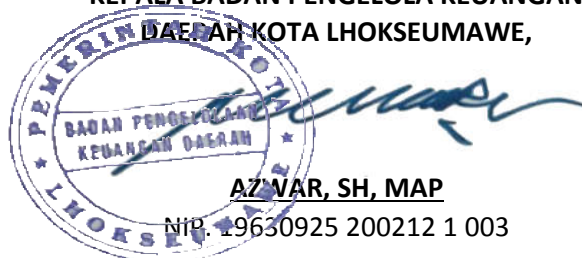
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENGUKURAN / RUMUS	TARGET THN AKHIR RENSTRA/ RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kategori Reformasi Birokrasi	1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1.1.1. Opini BPK	1.1.1.1. Cakupan Pelaksanaan Pengeluaran Belanja Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Pengeluaran Belanja Daerah	12 Bulan
				1.1.1.2. Cakupan Penyediaan Pedoman dan Dokumen APBK	Jumlah Dokumen Penyediaan Pedoman dan Dokumen APBK	7 Dokumen
				1.1.1.3. Opini BPK Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP
				1.1.1.4. Cakupan Laporan Pengelolaan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Aset Daerah	8 Dokumen
			1.1.2. Besaran Penerimaan PAD	1.1.2.1. Besaran Penerimaan PAD	Jumlah Besaran Penerimaan PAD	49,20 Milyar
			2.1. Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan TIK	2.1.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.1.1.1. Cakupan Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah Waktu Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah

PENGUKURAN KINERJA

SKPD : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN : 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelaksanaan Pengeluaran Belanja Daerah	12 Bln	12 Bln	100,00%
		Besaran Penerimaan PAD	51,00 Milyar	35,39 Milyar	69,40%
		Cakupan Penyediaan Pedoman dan Dokumen APBK	7 Dok	7 Dok	100,00%
		Opini BPK Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	100,00%
		Cakupan Laporan Pengelolaan Aset Daerah	8 Dok	8 Dok	100,00%
2.	Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan TIK	Cakupan Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	12 Bln	12 Bln	100,00%
					94,90%

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE,



AZWAR, SH, MAP

NIP. 19630925 200212 1 003



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KOTA LHOKEUMAWE
NOMOR : 09 TAHUN 2019**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGANDAERAH
KOTA LHOKEUMAWE**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA LHOKEUMAWE,**

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 ditegaskan setiap instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Penyusunan Laporan LPPD, LKPJ dan ILPPD;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;


8. Peraturan.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Manengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal, 02 Januari 2019

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE,**



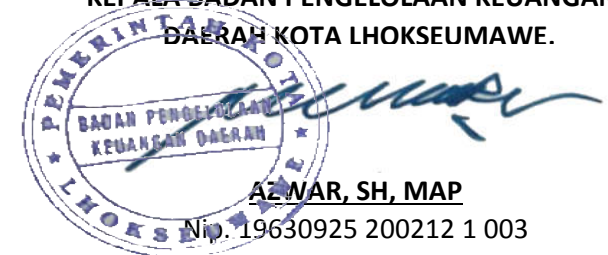
AZWAR, SH, MAP
Nip. 19630925 200212 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAERAH KOTA LHOKEUMAWE
 NOMOR : 09 TAHUN 2019
 TANGGAL : 02 JANUARI 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA HOKSEUMAWE

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENGUKURAN/RUMUS	SATUAN
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Opini BPK	Cakupan Pelaksanaan Pengeluaran Belanja Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Pengeluaran Belanja Daerah	Bulan
			Cakupan Penyediaan Pedoman dan Dokumen APBK	Jumlah Dokumen Penyediaan Pedoman dan Dokumen APBK	Dokumen
			Opini BPK Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini
			Cakupan Laporan Pengelolaan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Aset Daerah	Dokumen
		Besaran Penerimaan PAD	Besaran Penerimaan PAD	Jumlah Besaran Penerimaan PAD	Milyar
2.	Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan TIK	Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Cakupan Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah Waktu Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Bulan

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAERAH KOTA LHOKEUMAWE.



AZWAR, SH, MAP
 Nip. 19630925 200212 1 003



PEMERINTAH KOTA LHOXSEUMAWX
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 04 Keuangan
Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	51.000.500.000,00	35.395.357.659,86	(15.605.142.340,14)	69,40	Qanun Nomor 11 Tahun 2012 Qanun Nomor 10 Tahun 2012 Qanun Nomor 12 Tahun 2012 Qanun Nomor 07 Tahun 2012 Qanun Nomor 06 Tahun 2012 Qanun Nomor 13 Tahun 2012 Qanun Nomor 08 Tahun 2012 Qanun Nomor 09 Tahun 2012 Qanun Nomor 02 Tahun 2013 Qanun Nomor 04 Tahun 2010 Qanun Nomor 01 Tahun 2016 Qanun Nomor 04 Tahun 2016 Qanun Nomor 02 Tahun 2012 Keputusan Walikota Nomor 03 Tahun 2010
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	51.000.500.000,00	35.395.357.659,86	(15.605.142.340,14)	69,40	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	34.282.500.000,00	28.475.036.318,27	(5.807.463.681,73)	83,06	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	1.768.000.000,00	953.411.996,00	(814.588.004,00)	53,93	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.000.000.000,00	0,00	(6.000.000.000,00)	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.950.000.000,00	5.966.909.345,59	(2.983.090.654,41)	66,67	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	23.609.440.791,00	22.186.633.577,00	(1.422.807.214,00)	93,97	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.752.872.329,00	11.990.302.050,00	(762.570.279,00)	94,02	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	12.752.872.329,00	11.990.302.050,00	(762.570.279,00)	94,02	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	10.856.568.462,00	10.196.331.527,00	(660.236.935,00)	93,92	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.383.622.450,00	2.059.923.444,00	(323.699.006,00)	86,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	11.310.000,00	11.226.000,00	(84.000,00)	99,26	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	11.310.000,00	11.226.000,00	(84.000,00)	99,26	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	525.400.000,00	400.086.254,00	(125.313.746,00)	76,15	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	525.400.000,00	400.086.254,00	(125.313.746,00)	76,15	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	416.100.000,00	407.700.000,00	(8.400.000,00)	97,98	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<i>Belanja Pegawai</i>	414.600.000,00	406.200.000,00	(8.400.000,00)	97,97	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	119.800.000,00	119.152.840,00	(647.160,00)	99,46	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	119.800.000,00	119.152.840,00	(647.160,00)	99,46	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	34.400.000,00	30.522.000,00	(3.878.000,00)	88,73	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	34.400.000,00	30.522.000,00	(3.878.000,00)	88,73	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	20.611.750,00	20.611.750,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	20.611.750,00	20.611.750,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	69.900.000,00	46.862.500,00	(23.037.500,00)	67,04	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	69.900.000,00	46.862.500,00	(23.037.500,00)	67,04	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	307.500.000,00	306.748.900,00	(751.100,00)	99,76	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	307.500.000,00	306.748.900,00	(751.100,00)	99,76	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 20	<i>Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap</i>	876.600.700,00	715.013.200,00	(161.587.500,00)	81,57	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	<i>Belanja Pegawai</i>	776.500.000,00	680.250.000,00	(96.250.000,00)	87,60	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	100.100.700,00	34.763.200,00	(65.337.500,00)	34,73	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.890.131.762,00	1.863.605.018,00	(26.526.744,00)	98,60	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 05	<i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i>	772.000.000,00	769.505.780,00	(2.494.220,00)	99,68	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	772.000.000,00	769.505.780,00	(2.494.220,00)	99,68	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 11	<i>Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	443.000.000,00	435.720.625,00	(7.279.375,00)	98,36	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	443.000.000,00	435.720.625,00	(7.279.375,00)	98,36	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	405.000.000,00	397.113.313,00	(7.886.687,00)	98,05	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	60.000.000,00	59.532.000,00	(468.000,00)	99,22	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3	<i>Belanja Modal</i>	345.000.000,00	337.581.313,00	(7.418.687,00)	97,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	178.331.762,00	172.626.500,00	(5.705.262,00)	96,80	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	178.331.762,00	172.626.500,00	(5.705.262,00)	96,80	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 30	<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	83.800.000,00	80.648.800,00	(3.151.200,00)	96,24	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.800.000,00	80.648.800,00	(3.151.200,00)	96,24	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 34	<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor</i>	8.000.000,00	7.990.000,00	(10.000,00)	99,88	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.990.000,00	(10.000,00)	99,88	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	230.717.500,00	206.972.790,00	(23.744.710,00)	89,71	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 03 . 02	<i>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</i>	230.717.500,00	206.972.790,00	(23.744.710,00)	89,71	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	230.717.500,00	206.972.790,00	(23.744.710,00)	89,71	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	16.500.000,00	14.672.000,00	(1.828.000,00)	88,92	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 02	<i>Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah</i>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 04	<i>Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan</i>	15.000.000,00	13.172.000,00	(1.828.000,00)	87,81	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	3.772.000,00	(1.828.000,00)	67,36	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15	Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Daerah	293.981.100,00	289.297.198,00	(4.683.902,00)	98,41	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 14	<i>Verifikasi Dokumen penggajian Pemerintah Kota Lhokseumawe</i>	118.862.400,00	116.534.198,00	(2.328.202,00)	98,04	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.362.400,00	59.034.198,00	(2.328.202,00)	96,21	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 16	<i>Penataan Fungsi Pengelolaan Kas</i>	175.118.700,00	172.763.000,00	(2.355.700,00)	98,65	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	114.400.000,00	114.400.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.718.700,00	58.363.000,00	(2.355.700,00)	96,12	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16	Prgram Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah	716.783.000,00	677.203.932,00	(39.579.068,00)	94,48	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 50	<i>Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak</i>	260.425.000,00	260.099.232,00	(325.768,00)	99,87	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 50 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 50 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.270.000,00	35.116.400,00	(153.600,00)	99,56	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 50 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	185.155.000,00	184.982.832,00	(172.168,00)	99,91	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 52	<i>Penagihan Rutin Tunggalan Retribusi Daerah</i>	230.909.600,00	203.606.400,00	(27.303.200,00)	88,18	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	168.909.600,00	141.606.400,00	(27.303.200,00)	83,84	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 53	<i>Pendataan, Penetapan Retribusi Daerah dan Pemakaian Kekayaan Daerah</i>	144.173.400,00	134.393.300,00	(9.780.100,00)	93,22	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	83.400.000,00	77.650.000,00	(5.750.000,00)	93,11	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.773.400,00	56.743.300,00	(4.030.100,00)	93,37	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 54	<i>Pelaporan dan Verifikasi Piutang Retribusi Daerah</i>	81.275.000,00	79.105.000,00	(2.170.000,00)	97,33	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.400.000,00	52.400.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.875.000,00	26.705.000,00	(2.170.000,00)	92,48	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	3.944.775.550,00	3.716.725.134,00	(228.050.416,00)	94,22	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 01	<i>Penyusunan analisa standar belanja</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 02	<i>Penyusunan standar satuan harga</i>	60.000.000,00	59.940.000,00	(60.000,00)	99,90	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.650.000,00	37.650.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.350.000,00	22.290.000,00	(60.000,00)	99,73	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 06	<i>Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBK</i>	1.233.456.500,00	1.172.541.010,00	(60.915.490,00)	95,06	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.046.100.000,00	1.000.400.000,00	(45.700.000,00)	95,63	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	187.356.500,00	172.141.010,00	(15.215.490,00)	91,88	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 07	<i>Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBK</i>	223.695.000,00	197.597.050,00	(26.097.950,00)	88,33	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	223.695.000,00	197.597.050,00	(26.097.950,00)	88,33	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 08	<i>Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD</i>	181.633.000,00	143.922.900,00	(37.710.100,00)	79,24	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	181.633.000,00	143.922.900,00	(37.710.100,00)	79,24	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 09	<i>Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD dan DPPA SKPD</i>	183.575.500,00	159.967.100,00	(23.608.400,00)	87,14	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	183.575.500,00	159.967.100,00	(23.608.400,00)	87,14	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 10	<i>Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD</i>	172.607.351,00	172.547.851,00	(59.500,00)	99,97	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	73.400.000,00	73.400.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.207.351,00	99.147.851,00	(59.500,00)	99,94	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 11	<i>Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD</i>	64.900.800,00	64.823.000,00	(77.800,00)	99,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.900.800,00	64.823.000,00	(77.800,00)	99,88	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 18	<i>Penyusunan Standar Kebutuhan Umum</i>	35.460.000,00	29.790.000,00	(5.670.000,00)	84,01	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.150.000,00	25.350.000,00	(1.800.000,00)	93,37	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.310.000,00	4.440.000,00	(3.870.000,00)	53,43	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 21	<i>Penyusunan Buku Pedoman Penyusunan RKA dan DPA SKPD</i>	48.260.000,00	38.902.000,00	(9.358.000,00)	80,61	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.600.000,00	20.800.000,00	(1.800.000,00)	92,04	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.660.000,00	18.102.000,00	(7.558.000,00)	70,55	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 22	<i>Pembinaan / Pergeseran Anggaran</i>	65.280.000,00	59.395.200,00	(5.884.800,00)	90,99	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.000.000,00	29.800.000,00	(1.200.000,00)	96,13	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.280.000,00	29.595.200,00	(4.684.800,00)	86,33	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 26	<i>Peningkatan manajemen keuangan daerah</i>	254.774.400,00	254.475.100,00	(299.300,00)	99,88	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	106.200.000,00	106.200.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	148.574.400,00	148.275.100,00	(299.300,00)	99,80	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 27	<i>Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe</i>	150.931.049,00	145.416.523,00	(5.514.526,00)	96,35	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	73.400.000,00	68.800.000,00	(4.600.000,00)	93,73	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.531.049,00	76.616.523,00	(914.526,00)	98,82	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 28	<i>Manajemen Pengelolaan SIMDA Keuangan</i>	212.600.000,00	212.572.700,00	(27.300,00)	99,99	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	161.150.000,00	161.150.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.250.000,00	38.222.700,00	(27.300,00)	99,93	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 29	<i>Bimtek Pengelolaan Aplikasi SIMDA Keuangan</i>	73.000.000,00	64.742.900,00	(8.257.100,00)	88,69	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.400.000,00	19.900.000,00	(3.500.000,00)	85,04	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.600.000,00	44.842.900,00	(4.757.100,00)	90,41	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 39	<i>Pelayanan Validasi dan Verifikasi SSPD BPHTB</i>	159.071.000,00	159.053.200,00	(17.800,00)	99,99	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.071.000,00	85.053.200,00	(17.800,00)	99,98	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 40	<i>Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak</i>	189.056.000,00	187.397.500,00	(1.658.500,00)	99,12	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	115.056.000,00	113.397.500,00	(1.658.500,00)	98,56	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 41	<i>Verifikasi Lapangan dan Penilaian Individu Data Objek Pajak dan Zona Nilai Tanah PBB</i>	92.062.000,00	92.062.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.062.000,00	34.062.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 46	<i>Pengelolaan Pelaporan Keuangan</i>	32.300.000,00	32.297.000,00	(3.000,00)	99,99	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.497.000,00	(3.000,00)	99,91	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 47	<i>Pemetaan Akun Pendapatan dan Belanja</i>	13.500.000,00	12.799.900,00	(700.100,00)	94,81	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.500.000,00	8.800.000,00	(700.000,00)	92,63	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.999.900,00	(100,00)	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 48	<i>Penyusunan Saldo Awal Laporan Keuangan</i>	35.314.500,00	34.313.500,00	(1.001.000,00)	97,17	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 48 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.600.000,00	27.600.000,00	(1.000.000,00)	96,50	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.714.500,00	6.713.500,00	(1.000,00)	99,99	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 51	<i>Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Wajib Pajak</i>	309.492.400,00	300.276.300,00	(9.216.100,00)	97,02	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	235.492.400,00	226.276.300,00	(9.216.100,00)	96,09	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 52	<i>Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)</i>	30.888.100,00	27.437.000,00	(3.451.100,00)	88,83	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 52 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.888.100,00	27.437.000,00	(3.451.100,00)	88,83	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 53	<i>Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)</i>	48.024.350,00	35.470.100,00	(12.554.250,00)	73,86	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.024.350,00	35.470.100,00	(12.554.250,00)	73,86	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 54	<i>Penyusunan Perubahan KUA</i>	26.378.300,00	22.387.900,00	(3.990.400,00)	84,87	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.378.300,00	22.387.900,00	(3.990.400,00)	84,87	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 55	<i>Penyusunan Perubahan PPAS</i>	48.515.300,00	36.597.400,00	(11.917.900,00)	75,43	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.515.300,00	36.597.400,00	(11.917.900,00)	75,43	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18	Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah	164.842.500,00	163.528.500,00	(1.314.000,00)	99,20	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 02	<i>Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran</i>	84.895.000,00	84.241.000,00	(654.000,00)	99,23	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	70.600.000,00	69.950.000,00	(650.000,00)	99,08	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.295.000,00	14.291.000,00	(4.000,00)	99,97	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 05	<i>Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD</i>	79.947.500,00	79.287.500,00	(660.000,00)	99,17	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	73.200.000,00	72.550.000,00	(650.000,00)	99,11	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.747.500,00	6.737.500,00	(10.000,00)	99,85	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19	Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kekayaan Daerah	1.095.414.600,00	1.084.616.711,00	(10.797.889,00)	99,01	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 04	<i>Penyusunan Buku Inventaris Aset Daerah</i>	30.000.000,00	29.923.200,00	(76.800,00)	99,74	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.250.000,00	11.173.200,00	(76.800,00)	99,32	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 08	<i>Inventarisasi dan Sertifikasi Barang/Aset Daerah</i>	105.725.000,00	104.130.000,00	(1.595.000,00)	98,49	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	72.300.000,00	72.300.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.425.000,00	31.830.000,00	(1.595.000,00)	95,23	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 09	<i>Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi PPKD</i>	99.896.800,00	95.302.835,00	(4.593.965,00)	95,40	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.696.800,00	34.102.835,00	(4.593.965,00)	88,13	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 11	<i>Pemeliharaan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak</i>	230.000.000,00	228.865.700,00	(1.134.300,00)	99,51	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	230.000.000,00	228.865.700,00	(1.134.300,00)	99,51	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 12	<i>Penghapusan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak</i>	35.000.000,00	34.950.000,00	(50.000,00)	99,86	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.100.000,00	24.100.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.900.000,00	10.850.000,00	(50.000,00)	99,54	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 26	<i>Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah dengan SKPD di Jajaran Pemerintah Kota Lhokseumawe</i>	49.896.000,00	49.895.100,00	(900,00)	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.350.000,00	22.350.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.546.000,00	27.545.100,00	(900,00)	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 28	<i>Rekonsiliasi Aset Lancar dengan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe</i>	50.000.000,00	49.893.000,00	(107.000,00)	99,79	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.550.000,00	19.550.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.450.000,00	30.343.000,00	(107.000,00)	99,65	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 30	<i>Pengelolaan Aplikasi Persediaan</i>	150.000.000,00	149.964.200,00	(35.800,00)	99,98	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	116.400.000,00	116.400.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	33.564.200,00	(35.800,00)	99,89	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 31	<i>Pengelolaan Aplikasi SIMDA BMD</i>	160.000.000,00	158.063.776,00	(1.936.224,00)	98,79	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	95.200.000,00	94.618.500,00	(581.500,00)	99,39	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.800.000,00	63.445.276,00	(1.354.724,00)	97,91	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 33	<i>Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>	45.000.000,00	44.865.000,00	(135.000,00)	99,70	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.650.000,00	23.650.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.350.000,00	21.215.000,00	(135.000,00)	99,37	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 34	<i>Verifikasi dan Penelitian Belanja Bantuan</i>	49.896.800,00	48.824.100,00	(1.072.700,00)	97,85	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.896.800,00	16.824.100,00	(1.072.700,00)	94,01	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 35	<i>Perancangan Peraturan Walikota tentang Barang Milik Daerah</i>	40.000.000,00	39.981.000,00	(19.000,00)	99,95	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.550.000,00	24.550.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.450.000,00	15.431.000,00	(19.000,00)	99,88	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 40	<i>Buku Status Barang Milik Daerah</i>	50.000.000,00	49.958.800,00	(41.200,00)	99,92	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	25.158.800,00	(41.200,00)	99,84	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	119.800.000,00	119.786.800,00	(13.200,00)	99,99	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 08	<i>Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	119.800.000,00	119.786.800,00	(13.200,00)	99,99	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	72.600.000,00	72.600.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.873.000,00	22.859.800,00	(13.200,00)	99,94	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	24.327.000,00	24.327.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	27.391.059.209,00	13.208.724.082,86	(14.182.335.126,14)	48,22	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 6	PEMBIAYAAN DAERAH					
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	893.430.000,00	893.430.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	893.430.000,00	893.430.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	893.430.000,00	893.430.000,00	0,00	